

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI SEBAGAI AKIBAT CERAI TALAK DALAM PEMENUHAN MUT'AH DAN NAFKAH

Halimah Suci Warti, SH, 1420123033, Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Tahun 2016, Jumlah halaman 95.

ABSTRAK

Dasar pemikiran Penulis memilih judul ini karena berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan masih banyak sekali suami yang tidak mau memenehui kewajibannya yang berupa mut'ah dan nafkah padahal suami itu tahu bahwa mut'ah dan nafkah itu adalah kewajiban mereka sebagai salah satu akibat dari mengajukan permohonan cerai talak terhadap isteri. Bagi Penulis yang menjadi masalah pokok dalam tulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan pemenuhan mut'ah dan nafkah setelah adanya putusan cerai talak di Pengadilan Agama, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada isteri sebagai akibat cerai talak dalam pemenuhan mut'ah dan nafkah di Pengadilan Agama. Penulisan tesis ini bersumber dari data Putusan dan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Pariaman, juga mengadakan penelitian terhadap hukum normatif yang bersifat analisis deksriptif. Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan mut'ah dan nafkah itu tidak diatur secara tegas oleh undang-undang, oleh karena itu pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dalam hal ini Pemohon dan Termohon, namun pelaksanaan pemenuhan mut'ah dan nafkah itu dilakukan sebelum atau pada saat akan dilakukannya ikrar talak, dan ada juga yang melaksanakan pemenuhannya setelah ikrar talak dilangsungkan, bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada isteri adalah dengan mengharuskan suami untuk melaksanakan pemenuhan mut'ah dan nafkah itu sebelum atau pada saat ikrar talak akan dilakukan hal ini bertujuan untuk lebih terjaminnya pelaksanaan pemenuhan mut'ah dan nafkah itu serta apabila Pemohon dan Termohon itu sepakat untuk melaksanakan ikrar talak terlebih dahulu dan pemenuhan mut'ah dan nafkah dilaksanakan setelah ikrar talak diucapkan namun stelah itu tidak pernah dipenuhinya mut'ah dan nafkah itu sama sekali, maka bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Pengadilan Agama terhadap bekas isteri adalah bentuk mediasi dan kemudian menasehati bekas suami yang tidak mau melaksanakan kewajibannya tersebut selain itu jika suami adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka isteri bias saja mengajukan surat permohonan pembagian gaji kepada instansi dimana suami bekerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan juga Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 08/SE/1983. Terkait upaya yang dapat dilakukan oleh bekas isteri agar putusan Pengadilan Agama tentang mut'ah dan nafkah itu dapat dilaksanakan oleh suaminya adalah dengan cara mengajukan gugatan/permohonan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama ke Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Kata Kunci : CERAI TALAK, MUT'AH, NAFKAH

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI SEBAGAI AKIBAT CERAI TALAK DALAM PEMENUHAN MUT'AH DAN NAFKAH

Halimah Suci Warti, SH, 1420123033, Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Tahun 2016, Jumlah halaman 95.

ABSTRACT

The reason the author chose this title is based on the facts that are found in the field, that there are still a lot of husbands who do not want to fulfill the duty of their obligations in the form of Mut'a and Nafkah, even though they know that mut'ah and nafkah are the result of applying divorce to his wife. Based on the author opinion, the central issue in this paper is the implementation and fulfillment Mut'a and Nafkah, and what form of legal protection that can be given to the wife after the divorce judgment in court. The resources of this thesis are based on the data of Decision and Minutes of Hearing in Court Pariaman, and also conducted research on the legal normative descriptive analysis. The authors concluded that the implementation of the compliance Mut'a and Nafkah are not strictly regulated by law, therefore the implementation according to the agreement between Applicant and the Respondent, but the implementation of fulfilling Mut'a and Nafkah have to be done before or on when he would do pledge divorce, and there is also implementing a pledge fulfillment after the divorce took place. The forms of legal protection that can be given to the wife is to require the husband to carry out the fulfillment of mut'ah and nafkah before or at the time of divorce pledge will do it aims to more assurance of compliance implementation Mut'a and Nafkah as well as if the Petitioner and the Respondent agreed to carry out the divorce pledge in advance and fulfillment Mut'a and nafkah executed after talaq pronounced. If the husband was never fulfilled Mut'a and nafkah it at all, then the form of legal protection that can be provided by the Religious Court against the ex-wife is a form of mediation and then advised the former husband who does not want to comply with its obligations besides if the husband is a Civil Servant, the wife of can only petition division of salary to the agency where the husband works in accordance with Government Regulation No. 10 Year 1983 Jo Government Regulation No. 45 of 1990 and the Circular Head of State Personnel Administration (BAKN) No. 08 / SE / 1983. Related efforts to be made by the ex-wife in order to Religious Court ruling on mut'ah and nafkah can be carried out by her husband is by filing a lawsuit / execution petition against the decision of the Religious Courts Religious Courts concerned.

Key word : CERAI TALAK, MUT'AH, NAFKAH

